

RINGKASAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan relasi masyarakat sipil dan negara pada kancah politik lokal. Masyarakat sipil merupakan bagian dari suatu negara yang mempunyai konsepsi dan fungsi mengorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang hakekatnya berupaya untuk mempengaruhi kebijakan bukan untuk ikut terlibat merebut kekuasaan politik formal. Penelitian berfokus pada Relasi NU dengan Pemerintah dalam Dinamika Peraturan Daerah tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan pengalaman hidup dari sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah pengalaman itu terjadi. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu informan yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) tentang relasi NU dengan Pemerintah dalam dinamika perda tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.

Relasi NU dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam dinamika perda tentang tata nilai kehidupan bermasyarakat yang religius dijelaskan dengan tiga (3) aspek yaitu *pertama*, posisi dan peran pemerintah dalam membuat regulasi dari perda tata nilai berlandaskan ajaran Agama Islam kemudian direvisi menjadi tata nilai kehidupan yang religius. *Kedua* Upaya dan Hasil NU dalam mengkritisi perda tata nilai yang terjadi penyimpangan dari prinsip demokrasi, HAM, dan kaidah pembuatan perundang-undangan serta terlalu bias dan ambigu yang akan menjadikan multitafsir dalam implementasinya. *Ketiga*, orientasi NU dalam mengkritisi perda yang didasarkan pada pluralitas masyarakat, ideologi NU serta kepentingan politik antara NU dan Pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung adalah kedekatan NU dengan Pemerintah baik secara struktural, kultural maupun politis, keterbukaan pemerintah, jumlah masa NU. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah Materi perda yang terlalu tekstual, pro kontra dikalangan NU, kurang loyalitas kader NU, kurang wawasan warga nahdliyin dan pengaruh partai terhadap Pemerintah.

Kata Kunci: Relasi, Masyarakat Sipil, NU, Pemerintah, Peraturan Daerah.

SUMMARY

Abstract

This study aims to describe the relationship of civil society and the state on the local political scene. Civil society is part of a country that has the conception and function orient the progress and prosperity of society which essentially seeks to influence policy not to get involved formal political power. NU research focuses on relations with the Government in the Dynamics of Regional Regulation on the values of religious community life in the city of Tasikmalaya. The method used is qualitative with phenomenological approach that uses life experiences of as a tool for better understanding of the social, cultural, political or historical context that experience happen. Selection techniques informants using purposive sampling informants considered to know in depth information and trustworthy invitation depth interview (indepth interview) about NU relations with the Government regulations dynamics values religious community life in the city of Tasikmalaya.

Relation NU with the City of Tasikmalaya in the dynamic regulation of the values of social life that is religious is described by three (3) aspects: first, the position and role of the government in making the regulation of regulation values based on the teachings of Islam then revised to the values of religious life. Both efforts and results of NU in criticizing the regulation values that any deviation from the principles of democracy, human rights, and rule-making legislation and too biased and ambiguous that will make multiple interpretations in its implementation. Third, NU orientation in criticizing the regulations that are based on the plurality of society, NU ideology and political interests between the NU and the Government. Factors that support is the closeness NU with either strukturally Government, culturally and politically, the openness of the government, the amount of time NU. While the obstacle is too textual material regulations, the pros and cons among NU, NU cadres lack of loyalty, lack insights Nahdliyin and party influence on the Government.

Keywords: Relations, Civil Society, NU, Governments, regional regulation.